

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan sumber daya ekonomi yang melimpah dapat menjadi pendorong bagi suatu negara untuk dapat meningkatkan intensitas pembangunan ekonominya untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian ekonomi suatu negara. Begitu juga halnya dengan pembangunan ekonomi daerah. Dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan mitra dengan sektor swasta untuk menciptakan dan merangsang kegiatan ekonomi dalam wilayah atau daerah tersebut.

“Pembangunan ekonomi diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat” (Frisdiantara, 2016:3). Pada dasarnya pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional, salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Pembangunan ekonomi daerah sering menekankan pada kebijakan yang berdasarkan pada ciri khas daerah tersebut dengan didorong oleh potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Sehingga perlu untuk melihat apakah sebenarnya potensi wilayah tersebut demi mendorong

pertumbuhan maupun mengembangkan perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi akan mendorong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan” (Tarigan, 2009:13). Menganalisis daerah maupun membicarakan suatu daerah tidak akan terlepas dari membahas tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, PDRB sering dipakai untuk melihat pendapatan masyarakat tersebut. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik berdasarkan harga berlaku maupun konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan disuatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada. Gambaran PDRB yang memperlihatkan adanya laju pertumbuhan ekonomi, mencerminkan pendapatan yang diperoleh berdasarkan sektor-sektor ekonomi yang ada didaerah tersebut.

Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi dengan PDRB yang cukup besar di Pulau Sumatera. PDRB tersebut merupakan kontribusi dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. PDRB Sumatera Utara yang cukup besar dilihat dari meningkatnya PDRB dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan 2010 dari tahun 2012-2015.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Milyar Rupiah), 2012 – 2015

NO	KABUPATEN/ KOTA	2012	2013	2014*)	2015 **)
KABUPATEN					
1	Nias	1776.05	1888.76	1991.99	2100.11
2	Mandailing Natal	6210.82	6606.44	7036.90	7474.42
3	Tapanuli Selatan	6150.49	7222.61	7542.78	7921.24
4	Tapanuli Tengah	4943.04	5199.02	5460.85	5738.32
5	Tapanuli Utara	4198.63	4419.77	4645.42	4868.95
6	Toba Samosir	3985.21	4178.50	4355.07	4553.17
7	Labuhan Batu	16289.98	17263.41	18164.10	19079.93
8	Asahan	17872.41	18892.62	20004.51	21118.75
9	Simalungun	19117.54	20122.01	21194.28	22305.43
10	Dairi	4671.00	4906.86	5153.83	5413.75
11	Karo	10258.23	10765.99	11314.39	11880.93
12	Deli Serdang	47513.87	51896.06	55793.75	58722.46
13	Langkat	20858.68	22029.48	23157.01	24321.61
14	Nias Selatan	3074.46	3217.40	3356.39	3506.03
15	Humbang Hasundutan	2948.18	3085.20	3249.45	3419.57
16	Pakpak Bharat	569.86	603.55	639.29	677.18
17	Samosir	2105.65	2234.09	2367.10	2503.73
18	Serdang Bedagai	13558.85	14345.76	15080.38	15841.75
19	Batubara	17916.36	18674.62	19459.38	20259.69
20	Padang Lawas Utara	5531.49	5871.51	6228.35	6598.30
21	Padang Lawas	5332.02	5659,2	5997.31	6341.53
22	Labuhan Batu Selatan	13024.49	13812.09	14547.52	15294.17
23	Labuhan Batu Utara	11978.44	12729.04	13414.53	14109.37
24	Nias Utara	1645.93	1750.25	1847.62	1948.96
25	Nias Barat	877.93	923.29	970.55	1017.80
KOTA					
26	Sibolga	2458.50	2605.01	2758.57	2914.51
27	Tanjung Balai	3919.55	4152.39	4392.58	4637.50
28	Pematang Siantar	6753.56	7141.86	7594.53	7992.32
29	Tebing Tinggi	2758.87	2924.75	3084.05	3234.05
30	Medan	105162.00	110795.42	117528.08	124277.48
31	Binjai	5553.63	5890.97	6234.29	6571.20
32	Padang Sidempuan	2952.72	3124.02	3285.46	3451.08
33	Gunung Sitoli	2276.15	2417.72	2565.26	2703.50
TOTAL SUMUT		374244.59	391690.47	420415.57	442798.79
RATA-RATA		11340,75	12040,90	12739,87	13418,15

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dari tabel pada halaman sebelumnya, terlihat peningkatan PDRB Sumatera Utara setiap tahunnya. Pada tahun 2012 total PDRB Sumatera Utara sebesar 374.244,59 milyar rupiah. Kemudian meningkat menjadi 391.690,47 milyar rupiah pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 menjadi 420.415,57 milyar rupiah dan terakhir pada tahun 2015 total PDRB Sumatera Utara menjadi sebesar 442.798,79 milyar rupiah.

Peningkatan tersebut cukup baik jika dilihat dari total PDRB Sumatera Utara, namun bila dilihat per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tersebut, Kabupaten Pakpak Bharat adalah kabupaten dengan PDRB paling rendah dari 33 Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jika dilihat pada tabel di halaman sebelumnya, Tahun 2012 PDRB Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 569,86 milyar rupiah, tahun 2013 total PDRB Kabupaten Pakpak Bharat naik menjadi 603,55 milyar rupiah, tahun 2014 sebesar 639,29 milyar rupiah dan tahun 2015 total PDRB Kabupaten Pakpak Bharat menjadi sebesar 677,18 milyar rupiah. Walaupun setiap tahun PDRBnya meningkat. Namun tetap, total PDRB Pakpak Bharat adalah yang terkecil se-Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011-2016 atas Dasar Harga Konstan 2010



Sumber : BPS Kabupaten Pakpak Bharat

Kemudian jika dilihat dari pergerakan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mulai dari tahun 2011-2015 berdasarkan harga konstan 2010 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 berada di angka 6,032 % kemudian turun menjadi 6,008 % di tahun 2012. Penurunan yang cukup besar tampak pada tahun 2013 yaitu menjadi sebesar 5,911 %. Namun pada tahun 2014 sampai 2015 perlahan naik menjadi 5,922 % dan 5,927 %. Hanya saja kenaikan ini belum mencapai angka diatas 6,032% seperti pada tahun 2011. Yang berarti perekonomian di tahun 2010 ke 2011 masih lebih baik dibanding tahun tahun sesudahnya.

Jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita Kabupaten Pakpak Bharat dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain disekitarnya. Juga terlihat bahwa Kabupaten Pakpak Bharat memiliki pendapatan perkapita paling rendah dari tahun 2012-2015. Pendapatan perkapita Pakpak Bharat hanya sekitar 13 juta sampai 14 juta dalam setahun.

Tabel 1.2 Pendapatan Perkapita beberapa Kabupaten di Sekitar Pakpak Bharat dari Tahun 2012-2015.

Kabupaten	2012	2013	2014	2015
Pakpak Bharat	Rp13.354.111	Rp13.845.113	Rp14.359.614	Rp14.877.845
Toba Samosir	Rp22.627.820	Rp23.550.240	Rp24.388.860	Rp25.337.060
Samosir	Rp17.317.055	Rp18.323.628	Rp19.234.551	Rp20.225.787
Dairi	Rp17.034.210	Rp17.778.150	Rp18.567.330	Rp19.397.86
Humbang Hasundutan	Rp16.678.320	Rp17.238.440	Rp17.950.170	Rp18.687.090
Tapanuli Tengah	Rp15.060.610	Rp15.492.030	Rp15.925.380	Rp16.394.410
Karo	Rp27.883.730	Rp28.678.550	Rp29.570.660	Rp30.495.900
Tapanuli Utara	Rp14.689.630	Rp15.323.720	Rp15.971.110	Rp16.594.990

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Menurut North dalam Sjafrizal (2008:87) menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya keuntungan kompetitif yang dimiliki wilayah bersangkutan”. Bila suatu wilayah tertentu dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan akan meningkat cepat. Inilah yang menjadi dasar untuk wilayah Pakpak Bharat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga dapat menumbuhkan kegiatan ekspor dan bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Oleh sebab itu, terlihat bahwa Kabupaten Pakpak Bharat perlu melakukan pengembangan-pengembangan pada sektor perekonomiannya. Perlu kiranya mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka mencari sektor mana yang dapat menjadi basis dalam kabupaten tersebut.

Dalam hal ini PDRB dapat dijadikan ukuran yang tepat untuk melihat kondisi sektor-sektor ekonomi Pakpak Bharat pada saat ini. “Sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*,

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi” (Kurniawan & Budhi, 2015:120). Namun tahun 2013, BPS telah mengumumkan bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010 membagi sektor-sektor ekonomi kedalam 17 lapangan usaha. Dari 17 lapangan usaha inilah akan dilihat bagaimana sebenarnya perekonomian di Pakpak Bharat. Sektor-sektor manakah yang akan berpotensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Pakpak Bharat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terlihatlah bahwa Kabupaten Pakpak Bharat masih memerlukan kajian khusus tentang perekonomiannya. Perlu kiranya mengetahui secara lebih detail sektor mana saja yang dapat menjadi pendorong pertumbuhannya juga bagaimana pengaruhnya bagi Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhannya di antara kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara. Karna jika Kabupaten Pakpak Bharat mengembangkan tanpa melihat potensi yang ada di daerahnya, pertumbuhan dan pembangunan daerah akan kurang optimal. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul **“Analisis Sektor Unggulan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat”** merupakan hal yang penting untuk dibahas dalam upaya membangun dan mengembangkan perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat serta berguna sebagai strategi kebijakan terkait dengan arah dan pelaksanaan pembangunan sesuai sektor yang memiliki keunggulan di daerah tersebut. Hal ini dilakukan demi mendorong perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat di masa mendatang ke arah yg lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah tipe klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat ?
2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat ?
3. Apakah sektor basis berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak Bharat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tipe klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Untuk mengetahui pengaruh sektor basis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak Bharat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat dalam hal :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi arah kebijakan ekonomi pemerintah daerah terutama dalam rangka perencanaan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Sebagai sumber inspirasi dan bahan pertimbangan baik bagi pemerintah maupun bagi investor/masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat dalam membuat strategi perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.
3. Sebagai sumbangan karya ilmiah untuk penulisan penelitian yang relevan lainnya.